

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PENGELOLAAN
DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : RIZQA AMANDA KHAIRANI
NPM : 2005170072
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, pukul 09.00 WIB sampat dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIZQA AMANDA KHAIRANI
N P M : 2005170072
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : PENGARUH TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(M. FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA)

Penguji II

(DIANYUSTRIAWAN, S.E., M., Si)

Pembimbing

(M. FIRZA ALPI, S.E., M., Si)

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RIZQA AMANDA KHAIRANI
N.P.M : 2005170072
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : PENGARUH TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Februari 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

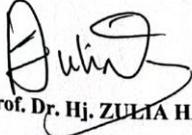
Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


oc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)


(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Rizqa Amanda Khairani
NPM : 2005170072
Dosen Pembimbing : M. Firza Alfi, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Kata Kunci / Penemuan		
Bab 2	- Kertas / pustaka / referensi		
Bab 3	- Populasi / Sampel / Metode / Definisi / Asumsi		
Bab 4	Hasil penelitian / hasil / kesimpulan / kata / kata		
Bab 5	Kesimpulan		
Daftar Pustaka	Mendapat		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Sidang		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Desember 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(M. Firza Alfi, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQA AMANDA KHAIRANI

N.P.M : 2005170072

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Tugas Akhir: PENGARUH TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



RIZQA AMANDA KHAIRANI

ABSTRAK

Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara

Rizqa Amanda Khairani

Program Studi Akuntansi

Email : rizqaamandakhairani@gmail.com

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equation model (PLSSEM). Adapun hasil penelitian menunjukkan Transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACK

The Influence Of Transparency and Community Participation On Village Depeloment with Village Fund Management as an Intervening Variable in Kualuh Hulu District, Regency North LabuhanBatu

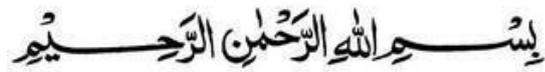
Rizqa Amanda Khairani
Program Studi Akuntansi

Email : rizqaamandakhairani@gmail.com

The purpose of this study is to examine the effect of Transparency and Community Participation on Village Development with Village Fund Management as an intervening variable in the Kualuh Hulu District, North Labuhanbatu Regency, both directly and indirectly. This study uses a quantitative approach and statistical analysis, specifically Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The research results show that Transparency does not have a positive and significant effect on Village Development. Transparency has a positive and significant effect on Village Fund Management. Community Participation does not have a positive and significant effect on Village Development. Community Participation does not have a positive and significant effect on Village Fund Management. Village Fund Management has a positive and significant effect on Village Development. Transparency has a significant effect on Village Development through Village Fund Management. Community Participation does not have a significant effect on Village Development through Village Fund Management.

Keywords: Transparency, Community Participation, Village Development, Village Fund Management

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya. Karena karunia dan rahmat-Nya penulis diberi kesempatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **”Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara”**.

Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui Tugas Akhir ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Tercinta Darma Dan Ibunda Tersayang Noviyanti yang telah banyak memberikan semangat, motivasi serta hiburan kepada penulis dan pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Firza Alpi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen program studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Seluruh para staf pegawai di kantor Desa Kecamatan Kualuh Hulu yang telah memberikan izin tempat riset dan dukungan kepada penulis.
10. Yang terkhusus Nailah Nurul Husna dan Alviandra Rafsya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, meskipun sering menyebalkan tetapi terimakasih sudah menjadi adik-adik yang membanggakan dan selalu menjadi kesayangan penulis.
11. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Rizqa Amanda Khairani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walau sering kali merasa putus asa

atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba, terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah di tahun ini. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu di mana pun berada. Rizqa, apa pun kurang dan lebihmu mari merayakan keberhasilan diri sendiri. Dan yang terakhir terima kasih masih hidup dan kuat sampai sekarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu segala proses penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin ...

Medan, April 2024

Rizqa Amanda Khairani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Stewardship (Stewardship Theory)	9
2.1.2 Transparansi.....	10
2.1.2.1 Pengertian Transparansi.....	10
2.1.2.3 Manfaat Transparansi.....	12
2.1.2.4 Prinsip - Prinsip Transparansi	12
2.1.2.5 Indikator Transparansi	13
2.1.3 Partisipasi Masyarakat.....	13
2.1.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	13
2.1.3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	14
2.1.3.3 Indikator Partisipasi Masyarakat	15
2.1.4 Pembangunan Desa	15
2.1.4.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	15
2.1.4.2 Tujuan Pembangunan Desa.....	16
2.1.4.3 Rencana Pembangunan Desa	17
2.1.4.4 Indikator Pembangunan Desa	18
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa	19

2.1.5.1	Pengertian Pengelolaan Dana Desa	19
2.1.5.2	Faktor – Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa.....	19
2.1.5.3	Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	20
2.1.6	Peneliti Terdahulu.....	21
2.2	Kerangka Konseptual	22
2.2.1	Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa	22
2.2.2	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa.....	22
2.2.3	Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa	23
2.2.4	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa ...	23
2.2.5	Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.....	24
2.2.6	Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Melalui Pengelolaan Dana Desa	24
2.2.7	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Melalui Pengelolaan Dana Desa	24
2.3	Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	27
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3.1	Tempat Penelitian.....	29
3.3.2	Waktu Penelitian	29
3.4	Populasi dan Sampel	30
3.4.1	Populasi.....	30
3.4.2	Sampel	30
3.5	Jenis Dan Sumber Data	31
3.5.1	Jenis Data.....	31
3.5.2	Sumber Data	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7	Uji Validitas dan Realibilitas	33
3.8	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
4.1.2	Deskripsi Identitas Responden	39

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	40
4.2 Analisis Data.....	46
4.2.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model).....	46
4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)	51
4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa	57
4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa	57
4.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa.....	58
4.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa ...	58
4.3.5 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa.....	59
4.3.6 Pengaruh Transparansi terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa	60
4.3.7 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa	60
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara Tahun 2022-2023.....	1
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	28
Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian.....	29
Tabel 3.3 Sampel Tempat Penelitian.....	31
Tabel 3.4 Instrumen Skala Likert.....	33
Tabel 4.1 Data Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin.....	39
Tabel 4.2 Data Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.3 Data Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	40
Tabel 4.4 Angket Skor Untuk Variabel Transparansi (X1).....	41
Tabel 4.5 Angket Skor Untuk Variabel Partisipasi Masyarakat (X2).....	41
Tabel 4.6 Angket Skor Untuk Variabel Pengelolaan Dana Desa (Z).....	42
Tabel 4.7 Angket Skor Untuk Variabel Pembangunan Desa (Y).....	45
Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Convergent Validity.....	47
Tabel 4.9 Hasil Composite Realibity.....	48
Tabel 4.10 Hasil <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....	49
Tabel 4.11 Hasil Discriminant Validity.....	50
Tabel 4.12 R-Square.....	51
Tabel 4.13 F-Square.....	53
Tabel 4.14 Dirrect Effect.....	54
Tabel 4.15 Indirrect Effect.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual	25
Gambar 4.1 Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Kualuh Hulu adalah salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kecamatan Kualuh Hulu terletak di ujung sebelah utara dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dan letak Ibu kota Kecamatan Kualuh Hulu berada di Kelurahan Aek Kanopan. sehingga rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Kualuh Hulu adalah 69.112 jiwa yang memperoleh anggaran dana Desa dari Pemerintah Pusat. Kecamatan Kualuh Hulu berada di dataran rendah dengan ketinggian 22 MDPL dan luas wilayah sebesar 637,39 Km² serta terdiri dari 2 Kelurahan, 11 Desa, 34 Lingkungan dan 105 Dusun, Dimana 11 Desa tersebut yaitu Desa Kuala Beringin, Parpaudangan, Perkebunan Hanna, Perkebunan Kanopan Ulu, Perkebunan Labuhan Haji, Londut, Perkebunan Membang Muda, Pulo Dogom, Sono Martani, Suka Rame, Suka Rame Baru. Desa yang terluas yaitu Desa Kuala Beringin, sedangkan Desa yang terkecil yaitu Desa Perkebunan Hanna.

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara Tahun 2022-2023

No	Wilayah/ Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran Ke RKD	Persentase Total Penyaluran	BLT Desa
1	Kuala Beringin	Rp. 1.447.391.000	Rp. 1.447.391.000	100,00%	RP. 579.600.000
2	Pulo Dogom	Rp. 919.854.000	Rp. 919.854.000	100,00%	Rp. 370.800.000
3	Londut	Rp. 819.153.000	Rp. 819.153.000	100,00%	Rp. 331.200.000

4	Perk. Kanopan Ulu	Rp. 909.404.000	Rp. 909.404.000	100,00%	Rp. 367.200.000
5	Perpaudangan	Rp. 862.085.000	Rp. 862.085.000	100,00%	Rp. 345.600.000
6	Perk. Membang Muda	Rp. 744.328.000	Rp. 744.328.000	100,00%	Rp. 298.800.000
7	Perk. Labuhan Haji	Rp. 695.597.000	Rp. 695.597.000	100,00%	Rp. 162.000.000
8	Perk. Hanna	Rp. 599.450.000	Rp. 599.450.000	100,00%	Rp. 241.200.000
9	Sukarame	Rp. 1.039.176.000	Rp. 1.039.176.000	100,00%	Rp. 417.600.000
10	Sukarame Baru	Rp. 1.004.834.000	Rp. 1.004.834.000	100,00%	Rp. 403.200.000
11	Sonomartani	Rp. 911.225.000	Rp. 911.225.000	100,00%	Rp. 367.200.000
Total		9.952.497.000	9.952.497.000		3.884.400.000

Sumber: <https://jaga.id>

Dari Tabel 1.1 Dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa di Kecamatan Kualuh Hulu di tahun 2022-2023 Total pagu anggaran sebesar Rp 9.952.497.000, dan dari beberapa desa di Kecamatan Kualuh Hulu jumlah dana desa yang tertinggi di peroleh oleh Desa Kuala Beringin yakni sebesar Rp 1.447.391.000, yang merupakan desa yang mendapatkan jumlah dana terbesar atau dapat dikatakan desa yang mendapatkan dana yang paling banyak dibandingkan dengan desa lainnya. Sedangkan jumlah dana desa yang terendah di peroleh oleh Desa Perk.Hanna yakni sebesar Rp 599.450.000. Diketahui setiap tahunnya total BLT Desa yang disalurkan kepada seluruh masyarakat yang sudah terdata setiap desanya sebesar Rp 3.884.400.000.

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang optimal maka diperlukan upaya dan kerja keras pengurus dan keikursertaan semua lapisan masyarakat. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, lahan pertanian dapat menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan

non fisik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak boleh dikesampingkan karena demikian juga diperlukan untuk keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Adapun tujuan dilaksanakannya pengelolaan dana desa tersebut adalah untuk mewujudkan program pemerintah dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan tercapainya tujuan ini akan adanya pemerataan pembangunan disetiap daerah.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mencakup pengungkapan informasi yang jelas dan akurat tentang anggaran, penggunaan dana, dan hasil pembangunan desa kepada masyarakat. Adapun arti dari transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi dari pemerintah kepada oknum-oknum yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kekayaan public. Transparansi dapat dimaknai bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban dan kesempatan yang setara untuk mengetahui proses anggaran yang terkait dengan kepentingan dan harapan masyarakat, yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Mewujudkan anggaran yang efektif dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan untuk proses penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Semua kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara transparan melalui Musrenbangdes yang hasilnya dicantumkan dalam peraturan desa tentang APBG serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan tingkat efektivitas dalam pengelolaan dana desanya, Semakin besar pengaruh partisipasi masyarakat sehingga efektivitas dalam pengelolaan dana desanya juga semakin baik (Putra & Rasmini, 2019). Demikian terkait kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan dana desa akan mengurangi rasa kepemilikan. Partisipasi masyarakat diutuhkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan, pemantauan kegiatan yang adil dan hasil yang berkelanjutan (Saragih & Alpi, 2023)

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sementara itu Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia peDesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perDesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju,

sejahtera dan berkeadilan.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh (Komariya et al., 2023) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Efektivitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa, Transparansi berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa, pengelolaan dana desa berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa. Berbeda pada penelitian (Amalia, n.d.) menyebutkan transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan Pra-riset yang dilakukan di Kecamatan Kualuh Hulu penulis menemukan salah satu desa yang tidak transparan dalam penggunaan APBDes yang dapat dilihat dari tidak adanya papan informasi mengenai pengelolaan dana desa (<https://detotabuan.com/>, 2024) Dan masyarakat yang tidak apatis terhadap proses penggunaan dan pengelolaan dana desa karena faktor pendidikan dan kurang nya sosialisasi dari pemerintahan desa mengenai program dana desa kepada masyarakat yang dapat dilihat dari perwujudan pemberdayaan dalam definisi pemerintah mampu melihat bagaimana kondisi masyarakat di daerahnya, dan juga kesenjangan hubungan masyarakat terhadap perangkat desa karena tidak memiliki kesempatan waktu yang sama. Berdasarkan beberapa uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

”Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Kurangnya transparansi perangkat desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.
- 2). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa
- 3). Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa mengenai program dana desa, sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu?
- 2) Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu?
- 3) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu?
- 4) Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

pada Kecamatan Kualuh Hulu?

5) Apakah Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu?

6) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pembangunan Desa dengan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu sebagai Variabel Intervening?

7) Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pembangunan Desa dengan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu sebagai Variabel Intervening?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus dicapai dan mengacu pada rumusan masalah penelitian untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu

3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu

4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu

5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu

6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap

Pembangunan Desa dengan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu sebagai Variabel Intervening

7) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa dengan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu sebagai Variabel Intervening

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Sebagai pijakan, referensi dan kajian lebih lanjut pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dengan pengelolaan dana desa.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti yaitu sebagai langkah awal dalam mengaplikasikannya ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dengan pengelolaan dana desa.

b) Bagi pihak Kantor Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Sebagai bahan masukan bagi instansi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.

c) Bagi Akademis yaitu Sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan yang telah ada. Khususnya bagi mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Sektor Publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi/badan. (Wahida,2015) mengemukakan bahwa teori stewardship dapat diaplikasikan untuk menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajemen/aparatur pemerintahan) mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi pengelolaan keuangan dana desa yang berkualitas dan transparan.

Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Disini principle sebagai pemberi tanggungjawab juga memiliki peran memonitori steward dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang. Steward atau pihak pemerintah juga harus memaksimalkan tanggungjawab yang diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat

berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (good governance) yang lebih transparan dan akuntabel.

Korelasi penelitian ini dengan stewardship theory adalah bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta melaporkan kepada masyarakat selaku principal atas seluruh aktivitas yang dilakukan. Masyarakat yang bertindak sebagai principal tentu mengharapkan pencapaian kinerja pemerintah yang baik, pencapaian tersebut dapat diakui atas dasar pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sedangkan seberapa baik pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan tergantung pada strategi yang diaplikasikan oleh pemerintah.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2020). Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut (Ritonga & Syahrir.2021) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan ini dipahami oleh informan (Kades, Sekdes, Bendahara atau kaur/kasi) sehingga langkah nyata yang dilakukan dengan memasang APBDes agar dapat diketahui program kegiatan desa dan juga anggaran yang akan dikeluarkan sehingga bisa adanya monitoring dari masyarakat terhadap pelaksanaannya (Widayanti et al., 2019)

Menurut (Hoesada, 2020) Asas transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa. Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa.

2.1.2.2 Tujuan Transparansi

Menurut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 30-31) mendefinisikan beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada Masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

2.1.2.3 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut (Andrianto,2007) yaitu :

1. Dapat mencegah terjadinya korupsi
2. Mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha

2.1.2.4 Prinsip - Prinsip Transparansi

Terdapat 6 (Enam) prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (FHI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan

3. Adanya laporan berkala mengenai penyalahgunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Pedoman dalam penyebaran informasi
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Laporan tahunan

2.1.2.5 Indikator Transparansi

Indikator – indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

2.1.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 (Infokum & Binbangkum, 2007) menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat

pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Saragih & Alpi, 2023)

2.1.3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut (Watson, 2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan.

Menurut (Tumbel, 2017) Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila

didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

2.1.3.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut (Ardianti, 2019) menyebutkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa
3. Kesempatan masyarakat dalam melakukan pengawasan
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa

2.1.4 Pembangunan Desa

2.1.4.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan desa merupakan peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Implementasinya tidak hanya pembangunan secara fisik saja, tetapi juga non fisik perlu diperhatikan. Factor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan di desa. Salah satu hal yang menunjang kesuksesan pembangunan desa adalah adanya pembangunan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan pengetahuan sumber daya manusia itu sendiri.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam UUD Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat.

2.1.4.2 Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Tujuan dari pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang / sektor dan kelembagaan dalam kerangka

Secara umum, hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang yaitu sosial, ekonomi, Pendidikan, sarana

Kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

2.1.4.3 Rencana Pembangunan Desa

Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Jika berbicara masalah pembangunan desa, maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik.

Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang baik pula. Dalam pelaksanaan suatu program pembangunan desa akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata dari sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan
2. Rencana Pembangunan Tahunanan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (Kessa, 2015)

Dalam Buku Perencanaan Pembangunan yang diterbitkan oleh Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebutkan tentang perencanaan pembangunan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas desa
2. Pendapatan desa

3. Penyusunan tata ruang desa
4. Penyelenggaraan musyawarah desa
5. Penyelenggaraan perencanaan desa
6. Pengelolaan informasi desa
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
8. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

2.1.4.4 Indikator Pembangunan Desa

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa maupun masyarakatnya untuk bisa menjadi subjek dari pembangunan. Dengan semakin diperkuatnya peran masyarakat di dalam UU Desa maka Pemerintahan Desa juga dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya, lebih terbuka serta bertanggungjawab. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempertegas komitmennya dalam mempersiapkan dan menjalankan UU Desa yang diterapkan di dalam perencanaan. Indeks Pembangunan Desa (IPD) dikembangkan oleh Bappenas dan BPS pada pertengahan 2015. Dengan menggunakan 5 indikator yaitu:

1. Pelayanan dasar
2. Kondisi infrastruktur
3. Aksesibilitas / transportasi
4. Pelayanan umum
5. Penyelenggaraan pemerintahan

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

2.1.5.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

2.1.5.2 Faktor – Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Sari,2017) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat.

Sementara itu implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

2.1.5.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan dana desa dengan tepat sasaran
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDesa
3. Penatausahaan atau pembukuan dana desa yang sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota
4. Pelaporan pengelolaan dana desa kepada Bupati/Walikota
5. Pertanggungjawaban kepala desa atas realisasi APBDesa.

2.1.6 Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizky Amalia Sugista (2017) jurnal	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa
2	Komariya, B., Indah Handayani, Y., & Ilmi, M. (2023) Jurnal	Pengaruh Akuntabilitas Transparansi, Efektivitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan efektivitas tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan dana desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan dana desa. 3. Akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa. 4. Transparansi dan Pengelolaan dana desa berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan desa. 5. Akuntabilitas, transparansi dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa. 6. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa.
3	Marhaendra Ihza Pahlevi,	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tranparansi, akuntabilitas,

Endah Susilowati, Astrini Aning Widoretno (2023) Jurnal	Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa	dan partisipasi masyarakat Berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
---	---	---

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa

Dengan adanya transparansi dari pemerintah desa mengenai pembangunan akan membuat masyarakat desa lebih ikut andil dan bertanggungjawab dalam proses kegiatan desa. Penelitian dilakukan oleh (Siregar,2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Transparansi terhadap Pembangunan Desa.

2.2.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Pembangunan desa perlu didukung oleh adanya sumber-sumber potensi yang ada, terutama partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kemudian didukung pula oleh pembinaan pemerintah, dalam arti pembangunan desa harus dilaksanakan dengan merata oleh semua umur, baik unsur pemerintah desa maupun masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa merupakan pembangunan desa atau bukan. Jika masyarakat desa tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. maka pada hakekatnya aktivitas tersebut bukan merupakan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan desa maupun pengembangan masyarakat

Penelitian dilakukan oleh (Siregar,2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa.

2.2.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya dan kinerja yang sudah dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nius Gwijangge,2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi dengan pengelolaan dana desa.

(Kumalasari,2018) menyatakan bahwa transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Garini & Ismiarti,2017) bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.

Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan dana desa sangat penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran.

Masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dapat membangun lingkungan disekitarnya menjadi lebih baik. Penelitian dilakukan oleh (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2.2.5 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Berbicara tentang pembangun desa erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana dari APBN yang digunakan untuk pembangunan desa. Penelitian dilakukan oleh (Fitriyani,2022) menyatakan bahwa Pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

2.2.6 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Melalui Pengelolaan Dana Desa

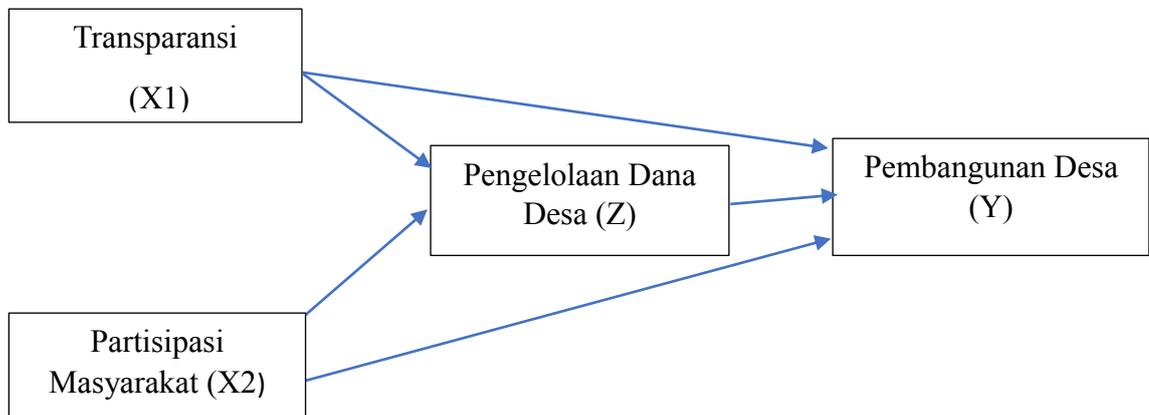
Transparansi merupakan keterbukaan secara menyeluruh dengan memberikan tempat kepada masyarakat aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto.2007). Sehingga dengan adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan penggunaan dana desa (Fitriyani, 2022).

2.2.7 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Melalui Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini

kemudian berkontribusi pada peningkatan pembangunan desa yang meliputi aspek fisik dan sosial – ekonomi.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual



2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2018) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan batasan dan rumusan masalah juga kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara
3. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara
4. Partisipasi Masyarakat berpengaruh Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara

5. Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara
6. Transparansi berpengaruh terhadap Pembangunan Desa melalui Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara
7. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pembangunan Desa melalui Pembangunan Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terdiri dari empat variabel yaitu Transparansi (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) sebagai variable bebas, Pembangunan Desa (Y) sebagai variable terikat dan Pengelolaan Dana Desa (Z) sebagai variable intervening. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut (Juliandi,2015) pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan penelitian dimana peneliti tersebut bertujuan untuk menganalisis permasalahan bahwa adanya hubungan suatu variable dengan variable lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan penjelasan di tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

NO	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1	Transparansi (X1)	Transparansi adalah suatu sifat keterbukaan mengenai informasi keuangan kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan percaya terhadap pihak yang berwenang	1.) Adanya pelaporan dan penyediaan informasi yang jelas 2.) Adanya fasilitas publik dalam mengetahui informasi 3.) Adanya kemudahan dalam melakukan kerja sama dengan media massa atau dengan semua jaringan yang ada	Likert
2	Partisipasi Masyarakat (X2)	Partisipasi Masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan hingga evaluasi pembangunan desa	1.) Adanya kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses Perencanaan, dan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 2.) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa 3.) Kesempatan masyarakat dalam melakukan pengawasan (Ardianti,2019)	Likert
3	Pengelolaan Dana Desa (Z)	Pengelolaan dana desa adalah proses penerimaan, pengalokasian dana, pelaporan, dan evaluasi pertanggungjawabang kepada pemangku kepentingan	1.) Perencanaan 2.) Pelaksanaan 3.) Penatausahaan 4.) Pelaporan 5.) Pertanggungjawaban (Asia et al., n.d.)	Likert
4	Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa	1.) Pelayanan Dasar 2.) Kondisi Infrastruktur 3.) Aksesibilitas / transportasi 4.) Pelayanan Umum 5.) Penyelenggaraan Pemerintahan (Bappenas dan BPS, 2015)	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu merupakan kapan penelitian dilakukan, penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret 2024 s/d Selesai. Untuk lebih jelasnya terhadap kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																					
2	Prariset Penelitian				■	■	■																		
3	Penyusunan Proposal						■	■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■								
5	Seminar Proposal																■								
6	Revisi Proposal																■	■	■						
7	Penyusunan Skripsi																			■	■	■	■		
8	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	
9	Sidang Meja Hijau																								■

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya”. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Desa yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara.

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti ini tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi”. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, dan untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampel dalam penelitian ini yaitu Masyarakat yang ada di kecamatan Kualuh Hulu dan 11 Desa yang masing-masing menggunakan 5 orang responden dengan total 55 responden. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur atau Kasi
4. Bendahara
5. Dewan Masyarakat

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling. Dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu setiap

elemen dalam populasi tidak memberikan peluang sama untuk terpilih sebagai sampel. Metode purposive sampling digunakan karena elemen-elemen yang dipilih menjadi unit sampel dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sampel Tempat Penelitian

No	Nama Desa
1	Desa Kuala Beringin
2	Pulo Dogom
3	Desa Londut
4	Desa Perk. Kanopan Ulu
5	Desa Perpaudangan
6	Desa Perk. Membang Muda
7	Desa Perk. Labuhan Haji
8	Desa Perk. Hana
9	Desa Sukarame
10	Desa Sukarame Baru
11	Desa Sonomartani

3.5 Jenis Dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang di teliti adalah data kuantitatif, yaitu dengan mempelajari jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

3.5.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer. Sumber data yang dimaksud adalah para pengelola dana desa yang ada pada kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Yang mana peneliti membuat daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada seluruh responden dengan teknik survei mandiri yaitu metode pengumpulan data primer, dalam hal ini responden diminta untuk mengisi jawaban sendiri pada kuesioner yang diberikan. Kuesioner adalah teknik penelitian dengan menyebarkan angket, sehingga dalam waktu relative singkat dapat menjangkau banyak responden (Saputra, 2014). Kuesioner digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dengan pengelolaan dana desa sebagai variabel intervening pada kecamatan kualuh hulu. Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya yaitu penentuan skor. Hal ini dilakukan karena teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dengan menetapkan skor

pada masing-masing jawaban. Skala yang digunakan dalam penentuan skor adalah skala likert. Pada skala likert pilihan jawaban yang tersedia adalah SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidaak Setuju) yang masing- masing diberikan skor sebagai berikut :

Tabel 3.4 Instrumen Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 Uji Validitas dan Realibilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

3.7.2 Uji Realibilitas

Menurut (Irfan et al,2014) reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran one shot atau

pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Irfan et al,2014)

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu teknik statistik untuk menjelaskan dan meringkas karakteristik data secara numeric atau grafis. Statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel variabel dalam penelitian ini. untuk mengetahui deskripsi data yang diperlukan dengan ukuran yang lebih ringkas yaitu ringkasan statistik. Ukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, median, dan deviasi standar.

Tujuan utama dari analisis data deskriptif adalah untuk memahami pola, tendensi sentral, dan variasi dari suatu kumpulan data. Dalam penelitian ini teknik analisis data diuji menggunakan metode *Structural Equation Modelling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Tujuan dari penggunaan (Partial Least Square) PLS

yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimumkan

3.8.1 Analisis Outer Model (Analisis Model Pengukuran)

Analisis model pengukuran (outer model) dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model) menggunakan pengujian, Discriminant validity (Juliandi, 2018)

a) Construct reliability and validity

Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria validitas dan reliabilitas konstruk dilihat dari composite reliability adalah > 0.6 (Juliandi, 2018)

b) Discriminant Validity

Discriminant validity adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Jika nilai HTMT < 0.90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Juliandi, 2018)

3.8.2 Analisis Inner Model (Analisis Model Struktural)

Analisis model struktural (inner model) biasanya juga disebut dengan (inner relation, structural model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisis model struktural (inner model) menggunakan tiga pengujian antara lain (1) R-square; (2) F-square; dan (3) pengujian hipotesis yakni (a) direct effect; (b) indirect effect dan (c) total effect (Juliandi, 2018)

a) R-Square

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Kriteria dari R Square adalah:

1. jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat);
2. jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang);
3. jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018).

b) F-Square

Pengukuran F-Square atau effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (F-square) disebut

juga efek perubahan. Artinya perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen(Juliandi, 2018). Kriteria F-Square menurut (Juliandi, 2018) adalah sebagai berikut:

- 1.) Jika nilai = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen;
- 2.) Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan
- 3.) Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

c) Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis (hypotesis testing) mengandung tiga sub analisis, antara lain: (a) direct effect; (b) indirect effect; dan (c) total effect.

1) Direct Effects (Pengaruh Langsung)

Tujuan analisis direct effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018). Kriteria untuk pengujian hipotesis direct effect adalah seperti terlihat di dalam bagian di bawah ini.

Pertama, koefisien jalur (path coefficient):

- a) Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik; dan
- b) Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah negatif, maka pengaruh

suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah. Kedua, nilai probabilitas/signifikansi (P-Value):

- a) Jika nilai P-Values < 0.05 , maka signifikan; dan
- b) Jika nilai P- Values > 0.05 , maka tidak signifikan (Juliandi,2018)

2) Indirect Effect (Pengaruh Tidak Langsung)

Tujuan analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator) (Juliandi, 2018) Kriteria menentukan pengaruh tidak langsung (indirect effect) (Juliandi, 2018) adalah :

- a) jika nilai P-Values < 0.05 , maka signifikan, artinya variabel mediator (Z/Etos Kerja), memediasi pengaruh variabel eksogen (X1/Transparansi) dan (X2/Partisipasi Masyarakat) terhadap variabel endogen (Y/Pembangunan Desa). Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung dan
- b) jika nilai P-Values > 0.05 , maka tidak signifikan artinya variabel Intervening (Z/Pengelolaan Dana Desa) tidak memediasi pengaruh suatu variabel eksogen (X1/Transparansi) dan (X2/Partisipasi Masyarakat) terhadap variabel endogen (Y/Pembangunan Desa). Dengan kata lain, pengaruhnya adalah langsung.

3) Total Effect (Total Efek)

Total effect merupakan total dari direct effect (pengaruh langsung) dan indirect effect (pengaruh tidak langsung) (Juliandi, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan perolehan data yang disebar dalam bentuk angket yang terdiri dari 3 butir pertanyaan untuk variabel transparansi (X1), 3 butir pertanyaan untuk Partisipasi Masyarakat (X2), 13 butir pertanyaan untuk pengelolaan dana desa (Z), dan 5 butir pertanyaan untuk pembangunan desa (Y). Angket yang disebar diberikan kepada 55 staf yang bekerja di kantor desa sekecamatan kualuh hulu sebagai responden sampel penelitian dengan menggunakan skala likert.

4.1.2 Deskripsi Identitas Responden

Data di dalam tabel-tabel di bawah ini menunjukkan identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.

Tabel 4.1 Data Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin

Identitas	Jumlah Responden	Persentase
1. Perempuan	26	47,3%
2. Laki - Laki	29	52,7%

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa presentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden laki-laki yaitu sebanyak 29 orang atau 52,7% dan untuk responden perempuan sebanyak 26 orang atau sekitar 47,3%.

Tabel 4.2 Data Identitas Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
20 – 29	26	47,3%
30 – 39	11	20%
40 – 49	14	25,4%
50 - 59	4	7,3%

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa presentase data karakteristik responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut berusia 20-29 tahun sebanyak 26 orang dengan persentase 27,3%, responden berusia 30-39 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 20%, responden berusia 40-49 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 25,4% dan responden berusia 50-59 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 7,3%.

Tabel 4.3 Data Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA/SMK/MAN	28	51%
D3	1	1,8%
S1	25	45,4%
S2	1	1,8%

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Dari tabel 4.3 diatas terlihat persentase pendidikan responden dalam penelitian ini mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK/MAN berjumlah 28 orang, D3 berjumlah 1 orang, dan S1 sebanyak 25 orang sedangkan responden berpendidikan S2 berjumlah 1 orang.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu transparansi (X1), partisipasi masyarakat (X2), pembangunan desa (Y), pengelolaan dana desa (Z). Deskripsi dari setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner akan menampilkan opsi setiap jawaban responden terhadap butir pernyataan yang diberikan penulis terhadap responden.

4.1.3.1 Variabel Transparansi

Tabel 4.4 Angket Skor Untuk Variabel Transparansi (X1)

No. item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	35	64%	17	31%	2	4%	0	0	1	2%
2	31	56%	21	38%	2	4%	0	0	1	2%
3	20	36%	30	55%	4	7%	1	2%	0	0

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden mengenai pernyataan Pemerintah terbuka dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar, mayoritas menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 35 orang atau 64%
2. Jawaban responden mengenai pernyataan Dana desa selalu diinformasikan melalui pembuatan spanduk/baliho, mayoritas menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 31 orang atau 56%
3. Jawaban responden mengenai pernyataan Kemudahan untuk mengakses dokumen tentang anggaran dana desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 30 orang atau 55%

4.1.3.2 Variabel Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.5 Angket Skor Untuk Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

No. item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	40%	30	55%	3	5%	0	0	0	0
2	16	29%	35	64%	4	7%	0	0	0	0
3	13	24%	36	65%	5	9%	1	2%	0	0

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden mengenai pernyataan Masyarakat aktif pada saat pelaksanaan rapat proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 30 orang atau 55%
2. Jawaban responden mengenai pernyataan Masyarakat terlibat langsung dalam proses penyusunan program program pengelolaan dana desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 35 orang atau 64%
3. Jawaban responden mengenai pernyataan Masyarakat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 36 orang atau 65%

4.1.3.3 Variabel Pengelolaan Dana Desa

Tabel 4.6 Angket Skor Untuk Variabel Pengelolaan Dana Desa (Z)

No. item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	14	25%	39	71%	2	4%	0	0	0	0
2	10	18%	42	76%	2	4%	1	2%	0	0
3	10	18%	41	75%	4	7%	0	0	0	0
4	14	25%	38	69%	3	5%	0	0	0	0
5	13	24%	39	71%	3	5%	0	0	0	0
6	13	24%	38	69%	2	4%	2	4%	0	0
7	16	29%	38	69%	1	2%	0	0	0	0
8	13	24%	39	71%	2	4%	1	2%	0	0
9	15	27%	39	71%	0	0	0	0	1	2%
10	16	29%	38	69%	0	0	0	0	1	2%
11	14	25%	40	73%	0	0	1	2%	0	0
12	12	22%	40	73%	3	5%	0	0	0	0
13	10	18%	41	75%	4	7%	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden mengenai pernyataan Pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 39 orang atau 71%
2. Jawaban responden mengenai pernyataan Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah baik, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 42 orang atau 76%
3. Jawaban responden mengenai pernyataan Komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah baik, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 41 orang atau 75%
4. Jawaban responden mengenai pernyataan Proses pencairan alokasi dana desa sudah sesuai mekanisme, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 38 orang atau 69%
5. Jawaban responden mengenai pernyataan Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa sudah baik, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 39 orang atau 71%
6. Jawaban responden mengenai pernyataan Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa,

mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 38 orang atau 69%

7. Jawaban responden mengenai pernyataan Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 38 orang atau 69%
8. Jawaban responden mengenai pernyataan Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 39 orang atau 71%
9. Jawaban responden mengenai pernyataan Pengelolaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa membuat buku kas umum yang meliputi menerima menyimpan ,menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 39 orang atau 71%
10. Jawaban responden mengenai pernyataan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 38 orang atau 69%
11. Jawaban responden mengenai pernyataan Peraturan Desa tentang laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sudah dilaksanakan dengan baik, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 40 orang atau 73%

12. Jawaban responden mengenai pernyataan Dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 40 orang atau 73%

13. Jawaban responden mengenai pernyataan Hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan yang direncanakan, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 41 orang atau 75%

4.1.3.4 Variabel Pembangunan Desa

Tabel 4.7 Angket Skor Untuk Variabel Pembangunan Desa (Y)

No. item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	24%	41	75%	1	2%	0	0	0	0
2	12	22%	40	73%	3	5%	0	0	0	0
3	20	36%	33	60%	0	0	1	2%	1	2%
4	15	27%	39	71%	0	0	1	2%	0	0
5	12	22%	42	76%	1	2%	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden mengenai pernyataan Pemerintah desa telah meningkatkan pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam pelayanan pemerintah, , mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 41 orang atau 75%
2. Jawaban responden mengenai pernyataan Infrastruktur yang dibangun

pemerintah cukup efektif, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 40 orang atau 73%

3. Jawaban responden mengenai pernyataan Pemerintah desa menyediakan transportasi berupa ambulance untuk memudahkan masyarakat, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 33 orang atau 60%
4. Jawaban responden mengenai pernyataan Pemerintah desa telah meningkatkan pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam pelayanan pemerintah, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 39 orang atau 71%
5. Jawaban responden mengenai pernyataan Penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai kewenangannya, mayoritas menjawab setuju yaitu sebanyak 42 orang atau 76%

4.2 Analisis Data

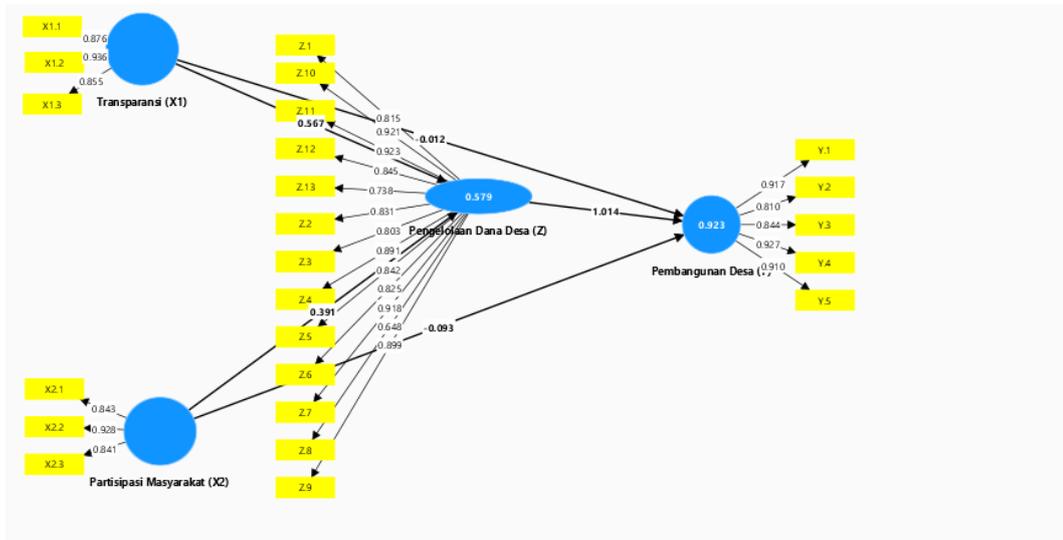
4.2.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

1) Construct Realibility and Validity

a) Convergent Validity

Convergent Validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score pada loading Factor yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,5 dengan konstruk yang ingin diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SmartPLS 4.

Gambar 4.1 Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model



Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	Rule of Thumb	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0.876	0.50	Valid
	X1.2	0.936	0.50	Valid
	X1.3	0.855	0.50	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	X2.1	0.843	0.50	Valid
	X2.2	0.928	0.50	Valid
	X2.3	0.841	0.50	Valid
Pembangunan Desa (Y)	Y1	0.917	0.50	Valid
	Y2	0.810	0.50	Valid
	Y3	0.844	0.50	Valid
	Y4	0.927	0.50	Valid
	Y5	0.910	0.50	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Z)	Z1	0.815	0.50	Valid
	Z2	0.831	0.50	Valid
	Z3	0.803	0.50	Valid
	Z4	0.891	0.50	Valid
	Z5	0.842	0.50	Valid
	Z6	0.831	0.50	Valid
	Z7	0.803	0.50	Valid
	Z8	0.648	0.50	Valid
	Z9	0.899	0.50	Valid
	Z10	0.921	0.50	Valid
	Z11	0.923	0.50	Valid
	Z12	0.845	0.50	Valid
	Z13	0.738	0.50	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil *Convergent Validity*

menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai outer loading >0.70 yang artinya semua indikator pada Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Kinerja Manjerial dinyatakan valid untuk mengukur setiap variabelnya.

b) Composite Realibity

Statistik yang digunakan dalam *composite reliability* atau reliabilitas konstruk adalah nilai *composite reliability* di atas 0,6 menunjukkan konstruk memiliki reliabilitas atau keterandalan yang tinggi sebagai alat ukur. Nilai batas 0,6 ke atas berarti dapat diterima dan diatas 0,8 dan 0,9 berarti sangat memuaskan.

Tabel 4.9 Hasil Composite Realibity

Variabel	Composite Realibity	Keterangan
Transparansi (X1)	0.919	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.904	Reliabel
Pembangunan Desa (Y)	0.946	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Z)	0.969	Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

Kesimpulan pengujian *composite reliability* adalah sebagai berikut :

1. Variabel transparansi adalah reliabel, karena nilai *composite reliability* transparansi adalah $0.919 > 0.6$.
2. Variabel partisipasi masyarakat adalah reliabel, karena nilai *composite reliability* partisipasi masyarakat adalah $0.904 > 0.6$
3. Variabel pembangunan desa adalah reliabel, karena nilai *composite reliability* pembangunan desa adalah $0.946 > 0.6$.
4. Variabel pengelolaan dana desa adalah reliabel, karena nilai *composite reliability* pengelolaan dana desa adalah $0.969 > 0.6$.

c) Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) menggambarkan besaran varian yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan dengan varian yang disebabkan oleh ekor pengukuran. Menurut Wiyono (2011) Standarnya adalah bila nilai AVE diatas 0.5 maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki convergent validity yang baik. Artinya, variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah variance dari indikator-indikatornya.

Tabel 4.10 Hasil *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Varian Extracted	Keterangan
Transparansi (X1)	0.792	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.760	Valid
Pembangunan Desa (Y)	0.779	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Z)	0.709	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai masing – masing variabel adalah >0.50 dengan nilai variabel Transparansi (X1) yaitu 0.792, Partisipasi Masyarakat (X2) yaitu 0.760, Pembangunan Desa (Y) yaitu 0.779, dan Pengelolaan Dana Desa (Z) yaitu 0.709. Maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memeiliki nilai AVE yang baik.

2) Discriminant Validity

Discriminant Validity (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai heretroit-monotrait ratic (HTMT). Jika nilai HTMT < 0.90 maka suatu konstruksi memiliki validitas diskriminan yang baik (Juliandi, 2018).

Tabel 4.11 Hasil Discriminant Validity

Discriminant Validity				
	X1	X2	Y	Z
X1		0.269	0.708	0.719
X2				
Y		0.479		
Z		0.569	1.010	

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

Kesimpulan pengujian heretroit – monotroit ratio (HTMT) adalah sebagai berikut :

1. Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi nilai htmt $0.269 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
2. Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa nilai htmt $0.479 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
3. Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa nilai htmt $0.569 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
4. Variabel Pembangunan Desa terhadap Transparansi nilai htmt $0.708 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
5. Variabel Pembangunan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa nilai htmt $1.010 > 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
6. Variabel Pengelolaan Dana Desa terhadap Transparansi nilai htmt $0.719 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda

dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).

4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)

1. *Path Coefficient*

Melihat signifikansi pengaruh antara konstruk dapat dilihat dari koefisien jalur (*path coefficient*). Tanda dalam *path coefficient* harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, untuk menilai signifikansi *path coefficient* dapat dilihat dari *t test (critical ratio)* yang diperoleh dari proses *bootstrampping (resampling method)*.

a) *R-Square*

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang di pengaruhi (endogen) dan dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik atau buruk (Juiandi,2018). Kriteria dari *R-Square* menurut (Juliandi,2018) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai R^2 (*adjusted*) = 0.75 berarti model adalah substansial (kuat).
2. Jika nilai R^2 (*adjusted*) = 0.50 berarti model adalah moderate (sedang).
3. Jika nilai R^2 (*adjusted*) = 0.25 berarti model adalah lemah (buruk).

Tabel 4.12 R-Square

	<i>R-Square</i>	R-Square Adjusted
Pembangunan Desa (Y)	0.923	0.918
Pengelolaan Dana Desa (Z)	0.579	0.563

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

1. Variabel Y (Pembangunan Desa) memiliki nilai R-Square Adjusted

sebesar 0.918 artinya kemampuan variabel X1 (Transparansi) dan X2 (Partisipasi Masyarakat) dalam menjelaskan variabel Y (Pembangunan Desa) adalah sebesar 91,8% dengan demikian model tergolong model substansial (kuat).

2. Variabel Z (Pengelolaan Dana Desa) memiliki nilai R-Square Adjusted sebesar 0.563 artinya kemampuan variabel X1 (Transparansi) dan X2 (Partisipasi Masyarakat) dalam menjelaskan variabel Z (Pengelolaan Dana Desa) adalah sebesar 56,3% dengan demikian model tergolong model moderate (sedang).

b) F-Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai R² saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substantive pada konstruk endogen (juliandi,2018). Kriteria F-Square menurut (juliandi,2018) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $F^2 = 0.02$ berarti efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.
2. Jika nilai $F^2 = 0.15$ berarti efek yang sedang/berat dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.
3. Jika nilai $F^2 = 0.35$ berarti efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Tabel 4.13 F-Square

	<i>F-Square</i>			
	Partisipasi Masyarakat (X2)	Pembangunan Desa (Y)	Pengelolaan Dana Desa (Z)	Transparansi (X1)
Partisipasi Masyarakat (X2)		0.080	0.343	
Pembangunan Desa (Y)				
Pengelolaan Dana Desa (Z)		5.602		
Transparansi (X1)		0.001	0.721	

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

1. Pengaruh variabel X1 (Transparansi) terhadap Y (Pembangunan Desa) memiliki nilai F-Square sebesar 0.001 artinya terdapat efek yang kecil dari variabel X1 terhadap Y.
2. Pengaruh variabel X1 (Transparansi) terhadap Z (Pengelolaan Dana Desa) memiliki nilai F-Square sebesar 0.721 artinya terdapat efek yang besar dari variabel X1 terhadap Z.
3. Pengaruh variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) terhadap Y (Pembangunan Desa) memiliki nilai F-Square sebesar 0.080 artinya terdapat efek yang besar dari variabel X2 terhadap Y.
4. Pengaruh variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) terhadap Z (Pengelolaan Dana Desa) memiliki nilai F-Square sebesar 0.343 artinya terdapat efek yang besar dari variabel X2 terhadap Y.

5. Pengaruh variabel Z (Pengelolaan Dana Desa) terhadap Y (Pembangunan Desa) memiliki nilai F-Square sebesar 5.602 artinya terdapat efek yang besar dari variabel Z terhadap Y.

c) *Dirrect Effect*

Tujuan analisis *dirrect effect* (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi,2018).

Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value) :

- Jika nilai P-Value < 0.05, maka signifikan.
- Jika nilai P-Value > 0.05, maka tidak signifikan.

Tabel 4.14 Dirrect Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standart Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	P-Value
Transparansi (X1) -> Pembangunan Desa (Y)	-0.012	-0.003	0.057	0.209	0.834
Transparansi (X1) -> Pengelolaan Dana Desa (Z)	0.567	0.457	0.270	2.098	0.036
Partisipasi Masyarakat (X2) -> Pembangunan Desa (Y)	-0.093	-0.114	0.071	1.321	0.187
Partisipasi Masyarakat (X2) -> Pengelolaan Dana Desa (Z)	0.391	0.486	0.205	1.911	0.056
Pengelolaan Dana Desa (Z) -> Pembangunan Desa (Y)	1.014	1.032	0.052	19.600	0.000

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

Kesimpulan dari nilai *dirrect effect* pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi terhadap Pembangunan Desa memiliki nilai

koefisien jalur -0.012 dan P-Value 0.834 (>0.05), artinya tidak signifikan.

2. Variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai koefisien jalur 0.567 dan P-Value 0.036 (<0.05), artinya signifikan.
3. Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa memiliki nilai koefisien jalur -0.093 dan P-Value 0.187 (>0.05), artinya tidak signifikan.
4. Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai koefisien jalur 0.391 dan P-Value 0.056 (>0.05), artinya tidak signifikan.
5. Variabel Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa memiliki nilai koefisien jalur 1.014 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya signifikan.

d) *Indirect Effect*

Analisis *indirect effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator). Kriterianya :

1. Jika nilai P-Value < 0.05 , maka signifikan. Artinya variabel intervening berperan dalam memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung.
2. Jika nilai P-Value > 0.05 , maka tidak signifikan. Artinya variabel intervening tidak berperan dalam memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah langsung (Juliandi,2018).

Tabel 4.15 Indirrect Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standart Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	P-Value
Transparansi (X1) -> Pengelolaan Dana Desa (Z) -> Pembangunan Desa (Y)	0.575	0.466	0.273	2.104	0.035
Partisipasi Masyarakat (X2) -> Pengelolaan Dana Desa (Z) -> Pembangunan Desa (Y)	0.397	0.506	0.225	1.762	0.078

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS 4 (2024)

Kesimpulan nilai indirrect effect pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh tidak langsung variabel Transparansi terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa adalah 0.575 dengan P-Value $0.035 < 0.05$, maka Pengelolaan Dana Desa -berperan dalam memediasi pengaruh Transparansi terhadap Pembangunan Desa.
2. Pengaruh langsung variabel Transparansi terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa adalah 0.397 dengan P-Value $0.078 > 0.05$, maka Pengelolaan Dana Desa tidak berperan dalam memediasi pengaruh Transparansi terhadap Pembangunan Desa.

4.3 Pembahasan

Analisis hasil penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ada tiga (3) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Transparansi Terhadap Pembangunan Desa hasil uji Direct Effect memiliki nilai koefisien jalur -0.012 dan P-Value $0.834 > 0.05$, berarti dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak signifikan terhadap pembangunan desa pada kecamatan kwaluh hulu.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Komariya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak terlalu signifikan terhadap pembangunan desa dikarenakan jika suatu desa transparan mengenai anggaran dana desanya maka semua orang bisa mengakses anggaran dana desa tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak peluang organisasi masyarakat yang terlibat sehingga dana desa tidak optimal untuk pembangunan desa itu sendiri.

4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa hasil uji Direct Effect memiliki nilai koefisien jalur 0.567 dan P-Value $0.036 < 0.05$, berarti dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada kecamatan kwaluh hulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (C. K. Dewi et al., 2019) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara jelas mengenai laporan pertanggungjawaban yang dipercayakan kepada pemerintah desa (Gean & Dewi, 2020)

4.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa hasil uji Direct Effect memiliki nilai koefisien jalur -0.093 dan P-Value 0.187 (>0.05), berarti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak signifikan terhadap pembangunan desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jaa et al., 2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak terlalu signifikan terhadap pembangunan desa disebabkan oleh masyarakat sudah percaya terhadap pemerintah desa karena masyarakat merasa pemerintah desa sudah cukup kompeten dan dapat dipercaya untuk melaksanakan pembangunan desa.

4.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa hasil uji Direct Effect memiliki nilai koefisien jalur 0.391 dan P-Value 0.056 (>0.05), berarti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Komariya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak terlalu signifikan terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa, mereka mungkin merasa bahwa pemerintah desa dapat mengelola dana desa dengan baik tanpa perlu pengawasan yang intens, karena mereka percaya bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

4.3.5 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa hasil uji Direct Effect memiliki nilai koefisien jalur 1.014 dan P-Value 0.000 (<0.05), berarti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa signifikan terhadap pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Komariya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa berpengaruh dan signifikan terhadap Pembangunan Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Dengan pengelolaan yang tepat, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kualitas SDM, serta kesejahteraan sosial masyarakat desa. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperkuat kapasitas pengelola Dana Desa, serta

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana tersebut.

4.3.6 Pengaruh Transparansi terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Transparansi terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa mempunyai koefisien jalur sebesar 0.575. pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0.035 < 0.05$, Berarti dapat disimpulkan bahwa Transparansi signifikan terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dengan adanya transparansi, penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini akan mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, yang pada akhirnya dapat menciptakan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

4.3.7 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa mempunyai koefisien jalur sebesar 0.397. pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0.078 > 0.05$, Berarti dapat disimpulkan bahwa Partisipasi

Masyarakat tidak signifikan terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Komariya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa adalah kunci keberhasilan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Dana Desa dapat digunakan secara lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. Selain itu, partisipasi juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan dan mendorong terciptanya desa yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa
3. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa
4. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa
5. Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa
6. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa
7. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa.

5.2 Saran

1. Peneliti Selanjutnya bisa menambahkan variabel independen agar hasil penelitian menjadi lebih lugas lagi dan diharapkan Penelitian Selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti kualitatif, karena dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. S. (n.d.). *the Influence of Transparency , Accountability , and Society Participation in Rural Financial Management Towards Rural*.
- Asia, N., Betan, U., & Nugroho, P. I. (n.d.). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Fitriyani, (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Semboro Kabupaten Jember). Skripsi (Jember: STIE Mandala Jember)
- Hoesada, J. (2020). Bunga Rampai: Akuntansi Pemerintahan. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Infokum, S., & Binbangkum, D. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007*. 1–11. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126362/permendagri-no-5-tahun-2007>
- Jaa, E., Supami, S., & Sulistyowati, W. (2019). Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jrma*, 7(1). <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/>
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLs. *Jangan Belajar*, 1(was), 1.
- Juniarti, U., & Inapty, B. A. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening* (Vol. 2, Issue 3).
- Komariya, B., Indah Handayani, Y., & Ilmi, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Kecamatan Pakusari Jember. *Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 22-38. <https://doi.org/10.31967/Jakuma.V4i2.961>

- Nius Gwijangge, I. K. J., & Putri, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, N. G. P. W. (2021). Village Government Accountability, Transparency and Village Fund Management. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1549–1560.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Rozali Abdullah. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2005, 170–171.
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Sari, R. N., Ribawanto, H., & Said, M. (2017). Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1880–1885.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 58-59
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16275/15778>
- Undang–Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi & Akuntabilitas Pemerintah Desa

UUD Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005

Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: “Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. *Journal.Feb.Unmul*, 16(1), 10–21

Zulkarnain, Z., & Nurdiati, W. (2020). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1617–1632.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>